

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Fadlil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perkembangan dalam Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- I D.G. Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta: Konstitusi Pers, 2018.
- Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2011.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

## JURNAL

Aldho Syafriandre, Aidinil Zetra, dan Feri Amsari, *Malpraktik Dalam Proses Verifikasi Partai Politik di Indonesia: Studi Pada Pemilihan Umum 2019*, Jurnal Wacana Politik, Vol. 4 Nomor 1, 2019.

Anna Triningsih, *Proliferasi Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Pada Era Reformasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lex Jurnalica Vol. 15 Nomor 3, 2018.

Bambang Sutiyoso, *Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 7. Nomor 6, 2010.

Catherine Natalia, *Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 9 Nomor 5, 2016.

Fajar Laksono Soeroso, *Pembangkitan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT*, Jurnal Yudisial Vol. 6 Nomor 3, 2013.

Fajar Laksono Soeroso, Winda Wijayanti, Anna Triningsih, dan Nuzul Qur'aini Mardiyah, *Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI*, Jurnal Konstitusi Vol. 10 Nomor 4, 2013.

Habib Syafingi, *Urgensi Pendidikan Partai Politik Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu*, Jurnal Konstitusi Vol. 11 Nomor 1, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 4, 2006.

Joko Widodo, *Konstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, Lex Jurnalica Vol. 11 Nomor 2, 2014.

Joko Widodo, *Urgensi Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Norma*, Lex Jurnalica Vol. 14 Nomor 3, 2017.

Khairul Fahmi, *Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 194*, Jurnal Cita Hukum Vol. 4 Nomor 2, 2016.

Wasis Susetio, *Konsep Welfare State Dalam Amandemen UUD 1945: Implementasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan (Beberapa Tinjauan Dari Putusan MKRI)*, Lex Juristica Vol. 4. Nomor 2, 2007.

Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Negara Hukum Vol. 9 Nomor 1, 2018.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

#### **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, tanggal 26 Februari 2020.

#### **SKRIPSI**

Novriama, Yunka. *Skripsi "Presidential Threshold Dalam Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU- XV/2017)"*. Jakarta: UEU, 2019.

#### **MEDIA INTERNET**

Christian Dior Simbolon, *Modifikasi Verifikasi Tidak Adil*, (On-Line) Tersedia Di <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/141579-modifikasi-verifikasi-tidak-adil> di akses 15 Mei 2020.

Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014*. (On-Line) Tersedia Di [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/05.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/05.pdf) di akses 16 Mei 2020.

Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.* (On-Line) Tersedia Di [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/58\\_SK%20Nomor%2058%202018.PDF](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/58_SK%20Nomor%2058%202018.PDF) di akses 16 Mei 2020.

Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.* (On-Line) Tersedia Di <https://mkri.id/public/content/pemilu/KKPU/SK%2080%20THN%202018.pdf> di akses 16 Mei 2020.

Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.* (On-Line) Tersedia Di [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/142.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/142.pdf) di akses 16 Mei 2020.

Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.* (On-Line) Tersedia Di [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/165.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/165.pdf) di akses 16 Mei 2020.

Komisi Pemilihan Umum, *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.* (On-Line) Tersedia Di [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/SK%20no%20309.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/SK%20no%20309.pdf) di akses 16 Mei 2020.

Moh. Nadlir, *KPU Diminta Patuhi Putusan MK dan Tetap Verifikasi Faktual Parpol Lama.* (On-Line) Tersedia Di <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/16/22531451/kpu-diminta-patuhi-putusan-mk-dan-tetap-verifikasi-faktual-parpol-lama?page=all> di akses 12 September 2019.

Tri Jata Ayu Pramesti, *Perbedaan Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum.* (On-Line) Tersedia Di  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt552a59833c9f1/perbedaan-peraturan-dan-keputusan-kpu/> diakses 24 Januari 2020.

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**

Universitas  
**Esa Unggul**